



Judul : Bergantung pada Utang
Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Bergantung pada Utang

JAKARTA – Pembangunan sejumlah sektor di Indonesia masih bergantung pada utang. Sepertinya negeri ini akan kesulitan untuk membangun kalau tidak ada utang.

Selain dari utang, kebutuhan modal untuk pembangunan bergantung pada kredit perbankan. Namun perbankan memiliki keterbatasan likuiditas dalam menyalurkan kreditnya.

Perbankan hanya mampu memberikan kredit maksimal 35% atau Rp4,000 triliun dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp11.000 triliun. Jadi sudah pasti kredit perbankan Indonesia tidak cukup.

Kondisi ini berbeda dengan di negara lain yang perbankannya mampu menyalurkan kredit untuk pembangunan dalam negeri menyamai kebutuhan negara.

Diketahui, posisi utang Indonesia per akhir Mei 2020 berada di angka Rp5.258,57 triliun. Nilai ini naik dari posisi akhir April 2020 yang berkisar Rp5.172,48 triliun. Rasio utang per akhir Mei 2020 naik di angka 32,09% dari PDB dari bulan sebelumnya di angka 31,78% dari PDB.

Adapun komposisi utang pada Mei 2020 terdiri atas Rp4.442,90 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp815,66 triliun dari pinjaman. Jika diperinci ada SBN senilai Rp3.248,23 dalam bentuk nilai tukar domestik yang terbagi menjadi Rp2.650,69 triliun Surat Utang Negara (SUN) dan Rp597,54 triliun Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN). Lalu Rp1.194,67 triliun berde-nominasi valas dengan pembagian Rp970,73 triliun SUN dan Rp223,94 triliun SBSN.

Komposisi pinjaman terbagi menjadi Rp9,94 triliun pinjaman dalam negeri dan Rp805,72 triliun pinjaman luar

TOPANG? PEMBANGUNAN

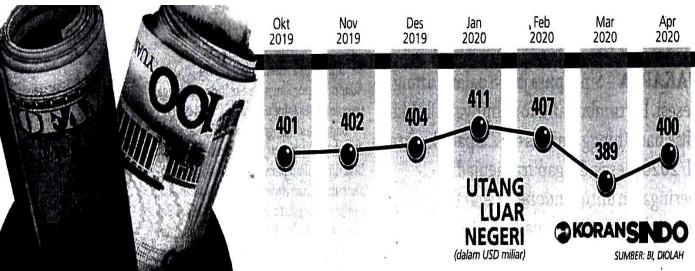
Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak mungkin semuanya dibayai dari APBN. Apalagi bila pungutan pajak tidak mencapai target.

negeri. Pinjaman luar negeri pun terdiri atas Rp316,68 triliun bilateral, Rp446,69 triliun multilateral, dan Rp42,35 triliun dari bank komersial.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut melonjaknya utang pemerintah yang meningkat menjadi 30,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun lalu. Adapun nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2018 yang hanya mencapai 29,81% dari PDB.

"Selain itu posisi utang pemerintah terhadap PDB pada 2019 mencapai 30,23% atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yang sebesar 29,81%," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan LKPP 2019 pada rapat paripurna DPR RI kemarin.

Di memerinci nilai pokok utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp4.786



UTANG LUAR NEGERI (dalam USD miliar)

KORANSINDO

SUMBER: BI, DOLAH

sebesar Rp53,39 triliun.

"Realisasi pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pembayaran utang sebesar Rp437,54 triliun. Artinya pengadaan utang tahun 2019 melebihi kebutuhan pembayaran untuk menutup defisit," tanda dia.

Dalam sebuah kesempatan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui bahwa utang masih akan menjadi penopang APBN pada 2020. Walaupun begitu tidak sepenuhnya utang itu menjadi pembayaran utama.

Menkeu mengungkapkan pengelalan dan pemanfaatan sumber pembayaran utang pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mendukung program-program pembangunan untuk menjadi Indonnesia lebih maju dan demi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, ketergantungan utang luar negeri punya dampak negatif bagi perekonomian. Pertama, pinjaman dalam bentuk valas akan menyedot suplai dolar di dalam negeri.

"Kedua, pemerintah harus menyediakan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok dengan valas yang besar. Wajar jika kurs rupiah menjadi mudah melemah dalam jangka panjang," katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Ketiga, pembayaran utang luar negeri yang cukup dominan membuat rasio *debt to service* meningkat. "Kalau utangnya valas ya harus dicari sumber valas. Padahal ditengah situasi pandemi kinerja ekspor dan devisa pariwisata sedang melemah. Implikasinya risiko kemampuan bayar utang makin besar," katanya.

Kedua, pembayaran utang luar negeri yang terus-menerus mempertanyakan posisi utang pemerintahnya. Semenara itu seprunguhnya utang Pemerintah Indonesia masih jauh di bawah batas yang dianggap tidak aman.

**Rina anggraeni/
kunthi fahmarr sandy/
oktiani endarwati**